

# EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENYUSUNAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DIVISI KEUANGAN KPU PROVINSI JAWA TIMUR

Arini Darajah<sup>1)\*</sup>, Tukiman<sup>2)</sup>

(e-mail: arinidara0@gmail.com<sup>1</sup>, tukiman\_upnjatim@yahoo.com<sup>2</sup>)

(\*) Corresponding Author

<sup>1), 2)</sup> Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN "Veteran" Jawa Timur

## ABSTRACT

Policies in a government agency are also made to respond to the needs and problems faced by the community. In the context of the policy of preparing a Letter of Responsibility (SPJ) in the finance division, the General Elections Commission (KPU) was made to ensure transparency and accountability of KPU financial management. SPJ is an important document used to account for the use of the budget that has been received by the KPU. SPJ must be prepared completely, accurately, and in accordance with applicable regulations. This research uses qualitative research methodology with a descriptive approach method. The results of this study stated that the policy of preparing SPJ in the Financial Division of the KPU of East Java Province has been quite effective, it can be seen from the conformity of the principles of SPJ applied in the Finance Division of the KPU of East Java Province, but in its implementation there are still several things that can be improved to increase the effectiveness of the preparation of SPJ in the Financial Division of the KPU of East Java Province.

**Keywords:** Policy; Effectiveness; SPJ

## ABSTRAK

Kebijakan dalam suatu instansi pemerintahan juga dibuat untuk merespon kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks kebijakan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada divisi keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibuat untuk untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan KPU. SPJ merupakan dokumen penting yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang telah diterima oleh KPU. SPJ harus disusun secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa kebijakan penyusunan SPJ di Divisi Keuangan KPU Provinsi Jawa Timur telah cukup efektif, Hal tersebut dilihat dari kesesuaian prinsip-prinsip SPJ yang diterapkan di Divisi Keuangan KPU Provinsi Jawa Timur, akan tetapi dalam implementasinya masih ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas penyusunan SPJ di Divisi Keuangan KPU Provinsi Jawa Timur.

**Kata Kunci:** Kebijakan; Efektivitas; SPJ

## I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, kebijakan dalam suatu instansi pemerintahan dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Tujuan tersebut dapat berupa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, melindungi hak dan kebebasan masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup ([Aini, 2022](#)).

Kebijakan dalam suatu instansi pemerintahan juga dibuat untuk merespon kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat. Misalnya, pemerintah membuat kebijakan untuk meningkatkan produksi pangan karena terjadi krisis pangan. Pemerintah juga membuat kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan karena kemiskinan merupakan masalah sosial yang dihadapi masyarakat ([Hasjimzum, 2014](#)).

Selain itu, kebijakan dalam suatu instansi pemerintahan juga dibuat untuk mencapai tujuan strategis pemerintah. Misalnya, pemerintah membuat kebijakan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah internasional. Pemerintah juga membuat kebijakan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera.

Dalam konteks kebijakan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada divisi keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibuat untuk untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan KPU. SPJ merupakan dokumen penting yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang telah diterima oleh KPU. SPJ harus disusun secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan ini dibuat untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan KPU dilakukan secara transparan dan akuntabel. Transparansi berarti bahwa pengelolaan keuangan KPU dapat diakses oleh masyarakat umum. Akuntabilitas berarti bahwa pengelolaan keuangan KPU dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kebijakan ini juga bertujuan untuk melindungi keuangan negara. SPJ yang disusun secara lengkap dan akurat dapat digunakan untuk mencegah terjadinya penyelewengan keuangan negara ([Wibowo,2022](#)).

Kebijakan penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) pada divisi keuangan KPU tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Namun, kebijakan ini dapat ditemukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum.

Diberlakukannya peraturan ini tidak lain bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan telah dicatat dan dipertanggungjawabkan secara akurat dan tepat waktu. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan

anggaran dan efektivitas penyelenggaraan pemilu ([KPU, 2023](#)).

Selain itu juga dengan diberlakukannya peraturan ini SPJ harus disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip seperti keakuratan, ketepatan waktu, kesederhanaan dan keterbukaan (KPU, 2023). Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2023 juga merupakan salah satu upaya dari KPU untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran belanja tahapan pemilihan umum. KPU juga berkomitmen untuk mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel demi mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas ([KPU, 2023](#)).

Dalam penelitian ini untuk dapat melihat efektivitas kebijakan penyusunan SPJ pada divisi keuangan KPU provinsi Jawa Timur, penulis menggunakan teori manajemen yang dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor (Taylor,2002). Teori manajemen memandang bahwa organisasi sebagai suatu sistem yang dikelola oleh orang-orang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, kebijakan penyusunan surat pertanggungjawaban merupakan salah satu alat manajemen yang digunakan untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan di KPU ([Taylor,2002](#)).

Untuk melihat efektivitas kebijakan penyusunan SPJ pada divisi keuangan KPU provinsi Jawa Timur, dapat dilakukan dengan mengukur dampak kebijakan penyusunan SPJ terhadap pencapaian tujuan pengelolaan keuangan, yang nantinya dampak kebijakan tersebut diukur dengan melihat dari pencapaian tujuan pengelolaan keuangan. Sehingga dalam penelitian ini efektivitas kebijakan penyusunan surat pertanggungjawaban dapat dilihat dari seberapa besar kebijakan ini berkontribusi terhadap pencapaian tujuan tersebut ([Taylor,2002](#)).

## II. METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut

Kriyantono, tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena secara menyeluruh dengan cara mengumpulkan data yang luas secara mendalam dan terperinci, data ini penting karena menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail penelitian. Metodologi ini menggunakan pendekatan deskriptif. [Sugiyono \(2014\)](#) menjelaskan metode deskriptif sebagai alat untuk mendeskripsikan atau menganalisis hasil penelitian, tetapi bukan untuk menarik kesimpulan. ([Sugiyono, 2014](#)).

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua jenis sumber data yakni data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang perolehannya berasal dari sumber langsung (tanpa perantara) berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, sedangkan data sekunder merupakan data yang perolehannya berasal dari sumber tidak langsung biasanya berisi dokumen dan arsip resmi.

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan seperti dokumen tertulis, artikel ilmiah dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur dalam peningkatan partisipasi politik Pemilu tahun 2024, ditinjau dari segi pengetahuan, dalam penelitian kualitatif sangat beragam, dalam hal ini tujuan penggunaan literatur akan tergantung dari jenis penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interactive* model analisis Miles, Huberman, dan Saldana.

### III. PEMBAHASAN

Divisi Keuangan KPU memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan KPU, termasuk menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan anggaran. Kebijakan penyusunan SPJ di Divisi Keuangan KPU bertujuan untuk memastikan

bahwa anggaran digunakan secara akuntabel dan transparan ([Bintang dan Nugroho, 2023](#)).

Penyusunan SPJ yang benar dan akurat dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Penyalahgunaan anggaran dapat berupa penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ([Bintang dan Nugroho, 2023](#)).

SPJ yang benar dan akurat dapat membantu mendeteksi adanya penyalahgunaan anggaran. Hal ini karena SPJ memuat informasi tentang tujuan penggunaan anggaran, jumlah anggaran yang digunakan, dan bukti pengeluaran. Kebijakan penyusunan SPJ di Divisi Keuangan KPU mencakup hal-hal berikut:

#### 1) Prinsip-prinsip penyusunan SPJ

Prinsip-prinsip penyusunan SPJ dapat diartikan sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyusun SPJ. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa SPJ yang disusun adalah benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan ([Muklis, 2013](#)). Dalam penyusunan SPJ haruslah mengikuti prinsip – prinsip yang telah ditetapkan sebagai berikut :

##### a. Akuntabel

SPJ harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti KPU, BPKP, dan masyarakat. Hal ini berarti bahwa SPJ harus memuat semua informasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran telah digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ([Agustin, 2018](#)).

##### b. Transparan

SPJ harus dapat diakses oleh publik. Hal ini berarti bahwa SPJ harus disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh orang awam ([Agustin, 2018](#)).

##### c. Tepat waktu

SPJ harus disusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa SPJ harus disusun dalam waktu yang ditentukan oleh KPU.

#### **d. Lengkap**

SPJ harus memuat semua informasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran telah digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi yang harus dicantumkan dalam SPJ antara lain uraian kegiatan, jumlah anggaran yang digunakan dan bukti pengeluaran.

#### **e. Benar**

SPJ harus disusun dengan benar dan akurat. Hal ini berarti bahwa SPJ harus sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip penyusunan SPJ, maka SPJ yang disusun akan lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga dalam penyusunan SPJ harus mengikuti tahap – tahapan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

##### **a. Pengumpulan dokumen pendukung**

Langkah pertama dalam penyusunan SPJ adalah mengumpulkan dokumen pendukung. Dokumen pendukung adalah dokumen-dokumen yang digunakan untuk mendukung kebenaran dan keakuratan SPJ. Dokumen pendukung SPJ dapat berupa bukti pengeluaran, seperti kuitansi, faktur, atau nota dinas, bukti penerimaan, seperti tanda terima, bukti perjanjian, seperti kontrak atau surat perjanjian serta bukti kepemilikan, seperti surat kepemilikan atau akta notaris.

##### **b. Pemeriksaan dokumen pendukung**

Langkah kedua adalah memeriksa dokumen pendukung yang telah dikumpulkan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen pendukung tersebut adalah sah dan lengkap.

##### **c. Pengisian formulir SPJ**

Langkah ketiga adalah mengisi formulir SPJ. Formulir SPJ adalah dokumen yang digunakan untuk menyusun SPJ. Formulir SPJ biasanya sudah disediakan oleh instansi atau lembaga yang mengeluarkan anggaran.

##### **d. Pemeriksaan ulang SPJ**

Langkah keempat adalah memeriksa ulang SPJ yang telah diisi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa SPJ tersebut telah disusun dengan benar dan

lengkap. Dalam penelitian ini menggunakan teori manajemen oleh Frederick Winslow Taylor dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas kebijakan penyusunan SPJ di Divisi Keuangan KPU. Teori ini terdiri dari empat elemen utama, yaitu ilmu, standarisasi, instruksi dan pemantauan. Dengan melihat keempat elemen tersebut jika dikaitkan dengan efektivitas dalam penyusunan SPJ maka dapat dilihat sebagai berikut :

##### **1) Ilmu**

Pada elemen ilmu, Divisi Keuangan KPU telah melakukan analisis pekerjaan untuk mengidentifikasi cara terbaik untuk menyusun SPJ. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode studi waktu dan gerak. Hasil analisis menunjukkan bahwa langkah-langkah penyusunan SPJ yang efektif adalah SPJ yang telah melewati tahapan – tahapan seperti pengumpulan dokumen pendukung, pemeriksaan dokumen pendukung, pengisian formulir SPJ serta, pemeriksaan ulang SPJ.

##### **2) Standarisasi**

Pada elemen standarisasi, Divisi Keuangan KPU telah menetapkan standar untuk setiap langkah penyusunan SPJ. Standar ini mencakup waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap langkah, metode yang harus digunakan, dan bahan yang diperlukan.

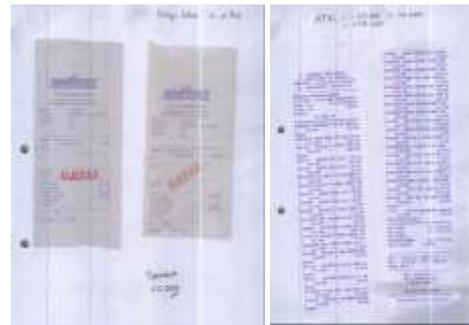
##### **3) Instruksi**

Pada elemen instruksi, Divisi Keuangan KPU telah memberikan instruksi yang jelas dan komprehensif kepada pekerja tentang cara melakukan penyusunan SPJ. Instruksi ini mencakup semua informasi yang diperlukan pekerja untuk melakukan penyusunan SPJ dengan benar dan efisien.

##### **4) Pemantauan**

Pada elemen pemantauan, Divisi Keuangan KPU telah melakukan pemantauan kinerja pekerja untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar. Pemantauan ini dilakukan melalui pengamatan langsung dan penggunaan catatan kinerja. Berdasarkan analisis terhadap empat elemen teori manajemen Taylor, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penyusunan SPJ di Divisi Keuangan

KPU Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan telah cukup efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari penyusunan yang dilakukan oleh Divisi Keuangan KPU Provinsi Jawa Timur yaitu terdiri dari surat perintah bayar (SPB), memo, lampiran memo, kuitansi, lampiran kuitansi, nota dinas (NOTDIN) dan yang terakhir yaitu bukti kuitansi belanja APBN atau lain-lain, yang mana dapat dilihat dari **Gambar 1.** hingga **Gambar 4.** di bawah ini:



Sumber: Hasil Penelitian

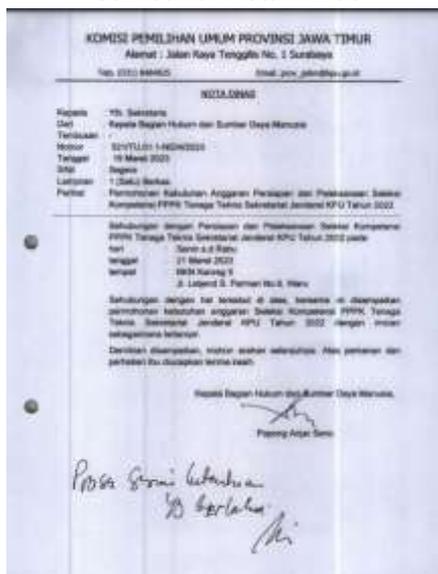
**Gambar 1. Surat Perintah Bayar dan Memo**



**Gambar 2. Kuitansi dan Lampiran Kuitansi**



**Gambar 3. Nota Dinas**



**Gambar 4. Bukti kuitansi belanja APBN**

Dengan melihat bukti yang dilampirkan maka dapat dikatakan bahwa SPJ di Divisi Keuangan KPU Provinsi Jawa Timur telah disusun secara efektif. Hal ini juga dikuatkan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua Divisi Keuangan KPU Provinsi Jawa Timur, yang mengatakan bahwa SPJ sudah dapat dikatakan rampung apabila sudah memenuhi syarat ini dan sudah bertanda tangan dari pejabat pembuat komitmen (PPK).

Meskipun demikian, masih ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penyusunan SPJ di Divisi Keuangan KPU. Salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan kepada pekerja tentang penyusunan SPJ. Pelatihan ini dapat membantu pekerja untuk memahami standar penyusunan SPJ dan meningkatkan keterampilan mereka dalam menyusun SPJ.

Selain itu, Divisi Keuangan KPU juga dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan penyusunan SPJ. Evaluasi ini dapat membantu Divisi Keuangan KPU untuk mengidentifikasi area-area yang dapat ditingkatkan.

#### IV. KESIMPULAN

Kebijakan penyusunan SPJ di Divisi Keuangan KPU Provinsi Jawa Timur telah cukup efektif, namun masih ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitasnya. Dengan memberikan pelatihan kepada pekerja, melakukan evaluasi secara berkala, menyiapkan panduan penyusunan SPJ yang lebih lengkap dan mudah dipahami,

serta mempertimbangkan untuk menggunakan sistem teknologi, Divisi Keuangan KPU Provinsi Jawa Timur dapat meningkatkan efektivitas kebijakan penyusunan SPJ dan memastikan bahwa anggaran digunakan secara akuntabel dan transparan. Salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan kepada pekerja tentang penyusunan SPJ. Pelatihan ini dapat membantu pekerja untuk memahami standar penyusunan SPJ dan meningkatkan keterampilan mereka dalam menyusun SPJ.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, L. G. R. U. (2018). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan panti asuhan (studi pada PSAA Udyana Wiguna Singaraja) Tahun 2016. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 10(2), 408-417.
- Aini, N. (2022). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dilihat Dari Aspek Sumber Daya (Studi Kasus Di Desa Mangkusip Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong). *JAPB*, 545-558.
- Bintang, A., Nugraha, A. R. P., & Nugroho, D. S. (2023). Efektivitas Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Divisi Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16(2), 157-172.
- Fadhil, M., Irfan, M., & Huda, M. N. (2022). Efektivitas penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) pada divisi keuangan pemerintah provinsi kalimantan selatan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 13(1), 1-10.
- Hasjimzum, Y. (2014). Model demokrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik (Studi otonomi daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca reformasi). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 445-457.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum. (2023, 11 Januari). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 28, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 721. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Muklis, P. (2013). Analisis Sistem Dan Prosedur Pelaporan Surat Pertanggungjawaban (Spj) Pada unit Pengembangan Produktivitas Daerah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, 2(3).
- Sugiyono. (2014.). Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D / Sugiyono. Bandung: Alfabeta.
- Taylor, F. W. (2002). Principles of scientific management. Mineola, NY: Dover Publications.
- Wibowo, Arie Mukti (2022) Proses Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pada Kantor Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Di Sidoarjo. Diploma Thesis, Stie Mahardhika Surabaya.